

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN RASIO GENDER TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Strata (S-1) di Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH

RENI MUSTIKA FITRI
BP/NIM : 2008/00508

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN RASIO GENDER TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Reni Mustika Fitri
BP / NIM : 2008 / 00508
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

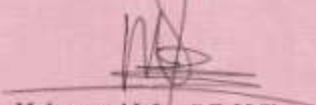
Padang, Desember 2012

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Prof. Dr. Syamsul Amar, B, M.S
NIP. 19571021 198603 1 001

Pembimbing II


Muhammad Irfan, S.E, M.Si
NIP. 19770409 200312 1 002

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


Drs. H. Athanis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertabankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN RASIO GENDER TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Reni Mustika Fitri
BP / NIM : 2008 / 00508
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2012

Tim Penguji

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
-------	---------	------	--------------

1.	Ketua	Prof. Dr. Syamsul Amar, B. MS
----	-------	-------------------------------

2.	Sekretaris	Muhammad Irfan, S. E, M.Si
----	------------	----------------------------

3.	Anggota	Yeniwati, S. E
----	---------	----------------

4.	Anggota	Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S
----	---------	-----------------------------



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mustika Fitri
NIM/BP : 00508/2008
Tempat/ Tgl Lahir : Balimbing/10 Mei 1989
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Pinangsori Induk No. 17 , RT 04/ RW 03, Air Tawar Timur, Padang
No. HP/Telp. : 085766554973/-
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini akan sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Oktober 2012
Yang Menyatakan,



Reni Mustika Fitri
2008.00508

ABSTRAK

Reni Mustika Fitri 2008/00508 : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B, M.S dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 2) pengaruh kualitas pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 3) pengaruh kualitas kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 4) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 5) pengaruh rasio gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) dengan data panel yaitu kombinasi 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif mencakup: 1) uji multikolinearitas 2) uji heterokedastisitas 3) uji autokorelasi 4) analisis model regresi 5) koefisien determinasi 6) uji F dan 7) uji parsial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 2) kualitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 3) kualitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 4) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat belum berkualitas. 5) rasio gender tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena budaya Minangkabau (Sumatera Barat) yang menganut sistem matrilinear, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Partisipasi penduduk perempuan terhadap pendidikan dan bekerja juga cukup tinggi. Oleh karena itu, deskriminasi terhadap penduduk perempuan tidak terjadi di Minangkabau. Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen sebesar 59,71 persen.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk, meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum perempuan, serta meningkatkan distribusi pendapatan bagi kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B, M.S selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B, M.S, Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si, Ibu Yeniwati, S.E, dan Ibu Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran serta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Alianis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B, M.S selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta (Haflinar) dan Ayahanda tercinta (Syafriwal) yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2008.
10. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Oktober 2012

Penulis

Reni Mustika Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. KAJIAN TEORI KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
1. Kemiskinan.....	15
1.1 Pengertian Kemiskinan	15
1.2 Ukuran Kemiskinan.....	18
1.3 Teori dan Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	23
2. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	32
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	35
4. Rasio Gender	37
5. Pengaruh Variabel Independent terhadap Variabel Dependent.....	37
5.1 Pengaruh Kualitas Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan.....	37
5.2 Pengaruh Kualitas Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan.....	41
5.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan.....	43
5.4 Pengaruh Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan	45
B. Temuan Penelitian Sejenis	46
C. Kerangka Konseptual	51
D. Hipotesis Penelitian	53

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	55
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Variabel Penelitian.....	57
F. Defenisi Operasional	58
G. Teknik Analisis Data	60
1. Analisis Deskriptif.....	60
2. Analisis Induktif	61
a. Uji Asumsi Klasik	61
1) Uji Multikolinearitas.....	61
2) Uji Heterokedastisitas.....	62
3) Uji Autokorelasi.....	62
b. Analisis Model Regresi	63
c. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2).....	64
d. Pengujian Hipotesis	64
1) Uji F	64
2) Uji Parsial.....	65

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	66
a. Letak Geografis Sumatera Barat.....	66
b. Penduduk.....	67
c. Ketenagakerjaan	69
d. Pendidikan	70
e. Kesehatan.....	71
2. Deskripsi Variabel Penelitian	72
a. Deskripsi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.....	72
b. Deskripsi Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.....	75
c. Deskripsi Kualitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.....	79

d. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.....	81
e. Deskripsi Rasio Gender di Provinsi Sumatera Barat.....	84
3. Analisis Induktif.....	86
a. Uji Asumsi Klasik.....	86
1) Uji Multikolinearitas.....	86
2) Uji Heterokedastisitas.....	87
3) Uji Autokorelasi.....	88
b. Analisis Model Regresi.....	89
c. Koefisien Determinan (Adjusted R ²).....	91
d. Pengujian Hipotesis.....	92
1) Uji F.....	92
2) Uji Parsial.....	93
B. Pembahasan.....	94
1. Pengaruh Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gender Secara Bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	94
2. Pengaruh Kualitas Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.....	95
3. Pengaruh Kualitas Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.....	98
4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.....	99
5. Pengaruh Rasio Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.....	103
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR REFERENSI	112
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010.....	4
2. Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2010.....	6
3. Temuan Penelitian Sejenis.....	47
4. Klasifikasi Nilai d(D-W).....	63
5. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah dan PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2010.....	68
6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat Tahun 2010	69
7. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2010.....	70
8. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2006-2010.....	73
9. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.....	76
10. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.....	80
11. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.....	82
12. Rasio Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.....	85
13. Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
14. Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas Uji <i>Park</i>	87
15. Hasil Uji Autokorelasi.....	88
16. Hasil Estimasi Model Regresi.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perbandingan Tingkat Penurunan/Pertambahan Penduduk Miskin per Tahun di Berbagai Negara Berkembang	2
2. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia.....	3
3. Lingkaran Setan Kemiskinan.....	27
4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat...	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Olah Kabupaten/Kota Sumatera Barat dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.....	116
2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	119
3. Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Park).....	122
4. Hasil Uji Autokorelasi (Uji DW).....	123
5. Hasil Analisis Model Regresi.....	124
6. Tabel Durbin Watson Pada Tingkat Penting 0.05	125
7. Surat Izin Penelitian dari Kantor BPS Sumatera Barat	126



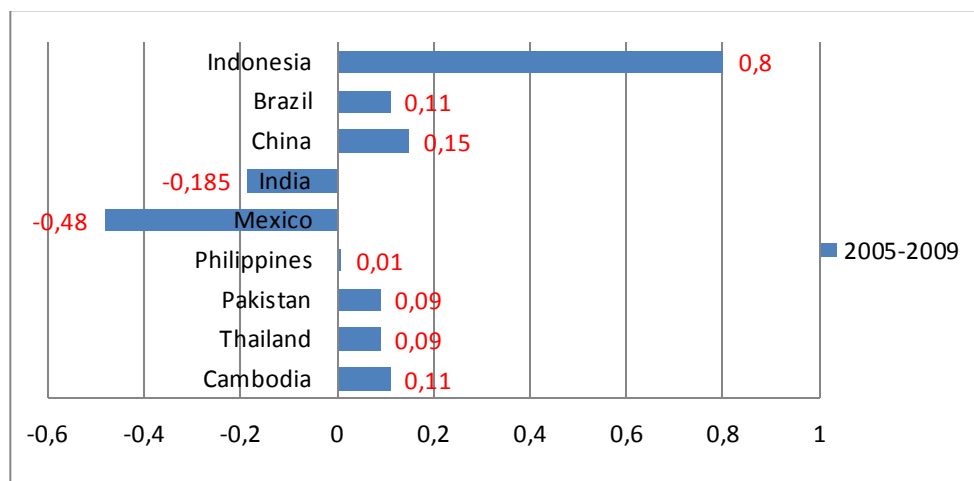
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan bukanlah masalah baru di Indonesia. Ketika merdeka pada tahun 1945 sebagian besar penduduk Indonesia hidup dalam keadaan yang sangat miskin sebagai akibat pendudukan Jepang selama perang Dunia ke-2. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, namun sampai saat ini kebijakan pembangunan yang dikembangkan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan *Worldfactbook*, BPS, dan *World Bank*, ditingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain seperti Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin (lihat Gambar 1).

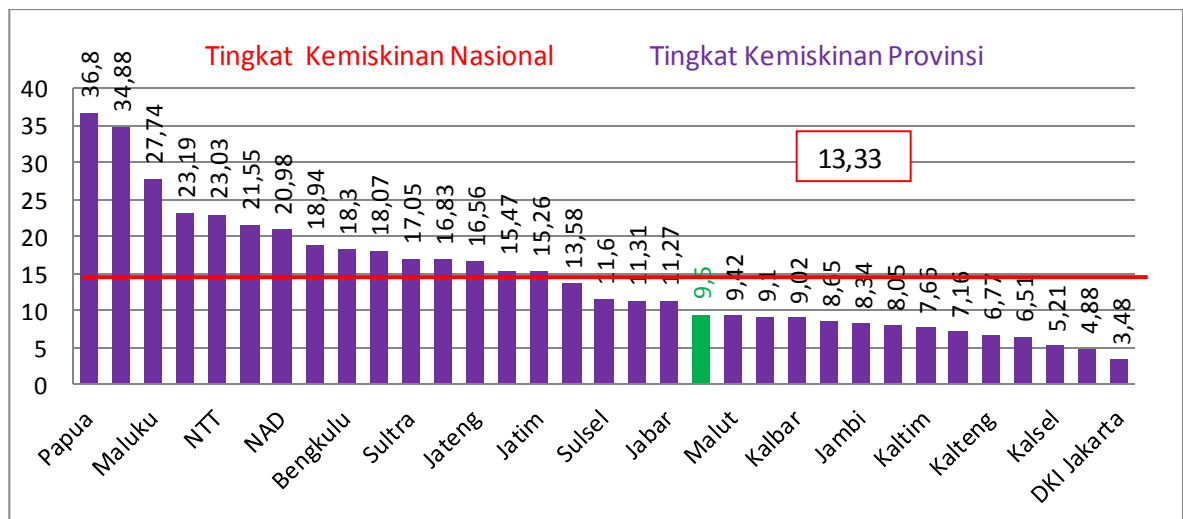


Gambar 1. Perbandingan Tingkat Penurunan/Pertambahan Penduduk Miskin per Tahun di Berbagai Negara Berkembang (Sumber : TNP2K 2011)

Laporan *MDGs* (Bappenas, 2010) mengungkapkan bahwa sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (*MDGs*) dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik, namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015. Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 8 - 10 % pada tahun 2014.

Meskipun Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi masih terdapat disparitas antarprovinsi. Gambar 2 menunjukkan tingkat kemiskinan pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010, dimana tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,33%. 17 provinsi telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat, sedangkan 16 provinsi lainnya tergolong lambat karena masih berada di atas

tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan yang paling tinggi terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 36,8%. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan paling rendah yaitu sebesar 3,48%.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010 (Sumber : IKR Sumatera Barat 2011)

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 lebih rendah daripada tingkat kemiskinan nasional, dimana tingkat kemiskinan Sumatera Barat sebesar 9,5%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,33%. Angka tersebut berada pada peringkat ke-20 dari 33 provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan karena berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, pemerintah Sumatera Barat harus berusaha lebih giat lagi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu masalah makro yang akan menghambat pembangunan daerah. Jika diamati antardaerah kabupaten/kota, tingkat kemiskinan sangat bervariasi. Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)			Rata-Rata
	2008	2009	2010	
Kab. Kepulauan Mentawai	22,86	20,54	19,77	21,06
Kab. Pesisir Selatan	11,36	10,56	10,22	10,71
Kab. Solok	13,43	12,15	11,74	12,44
Kab. Sijunjung	11,51	9,80	10,45	10,59
Kab. Tanah Datar	7,52	6,93	6,90	7,11
Kab. Padang Pariaman	14,15	12,41	11,86	12,81
Kab. Agam	11,20	9,86	9,85	10,30
Kab. Lima Puluh Kota	11,01	9,98	10,48	10,49
Kab. Pasaman	14,44	12,47	10,97	12,63
Kab. Solok Selatan	13,41	11,66	11,11	12,06
Kab. Dharmasraya	12,53	11,40	10,57	11,50
Kab. Pasaman Barat	10,96	9,61	9,59	10,05
Kota Padang	6,40	5,72	6,31	6,14
Kota Solok	7,32	6,76	7,00	7,03
Kota Sawahlunto	1,94	2,42	2,48	2,28
Kota Padang Panjang	8,24	7,58	7,59	7,80
Kota Bukittinggi	7,20	6,19	6,82	6,74
Kota Payakumbuh	10,96	10,15	10,58	10,56
Kota Pariaman	5,33	5,48	5,90	5,57
Rata-rata	10,62	9,56	9,48	9,89

Sumber : SUSENAS Sumatera Barat 2008- 2010

Tabel 1 menggambarkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2008-2010, dimana rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,89%. Ketimpangan tingkat kemiskinan antardaerah cukup besar karena sebagian daerah memiliki angka kemiskinan jauh lebih tinggi dan sebagiannya lagi memiliki angka kemiskinan jauh lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 21,06%. Kemudian Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 12,81% dan 12,44%. Sementara itu, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman memiliki rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 2,28% dan 5,57%. Begitu juga dengan Kota

Padang yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 6,14%. Dari data di atas terlihat jelas besarnya ketimpangan tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota di Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Barat harus berusaha lebih giat lagi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota walaupun secara nasional Sumatera Barat tergolong provinsi yang cukup berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Upaya Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia belum menunjukkan kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan negara lain. Namun, dari 33 provinsi di Indonesia, Sumatera Barat termasuk provinsi yang cukup berhasil dalam pembangunan manusianya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat daripada angka IPM nasional, dimana 73,78 untuk Sumatera Barat dan 72,27 untuk Indonesia. Angka tersebut berada pada peringkat ke-9 dari 33 provinsi di Indonesia.

Tingginya indeks pembangunan manusia Sumatera Barat dapat dilihat dari tingginya sumbangan pendidikan dan kesehatan, dimana seluruh indikator komposit pembangunan manusia yang terdiri dari angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup berada di atas rata-rata nasional. Angka melek huruf Sumatera Barat sebesar 97,09%, sedangkan nasional sebesar 92,91%. Sementara itu, Rata-rata lama sekolah Sumatera Barat sebesar 8,48 tahun, sedangkan nasional sebesar 7,92 tahun.

Begitu juga dengan angka harapan hidup Sumatera Barat sebesar 69,50 tahun, sedangkan nasional sebesar 69,43 tahun.

Jika diamati dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat cukup beragam sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rasio Gender (%)
Kab. Kepulauan Mentawai	93,58	6,51	68,45	4,88	48,14
Kab. Pesisir Selatan	94,92	7,48	67,31	5,28	50,56
Kab. Solok	97,19	7,60	66,60	6,26	50,70
Kab. Sijunjung	94,78	7,43	66,92	5,63	50,07
Kab. Tanah Datar	97,10	8,35	70,94	5,89	51,30
Kab. Padang Pariaman	94,49	7,26	68,65	5,14	50,92
Kab. Agam	97,85	8,50	69,04	5,68	50,96
Kab. Lima Puluh Kota	98,85	7,94	68,45	6,02	50,49
Kab. Pasaman	98,73	7,61	67,44	6,14	50,55
Kab. Solok Selatan	97,53	7,82	64,61	6,28	49,70
Kab. Dharmasraya	96,38	7,77	66,00	6,51	48,34
Kab. Pasaman Barat	98,20	8,00	65,15	6,39	49,60
Kota Padang	99,49	10,91	70,89	6,17	50,18
Kota Solok	98,51	10,43	69,69	5,96	50,57
Kota Sawahlunto	98,55	9,14	71,65	5,03	50,48
Kota Padang Panjang	99,30	10,23	71,30	6,05	50,29
Kota Bukittinggi	99,92	10,50	71,53	6,12	51,63
Kota Payakumbuh	99,18	9,66	70,62	6,38	50,44
Kota Pariaman	98,92	9,90	69,02	5,26	50,76
Sumatera Barat	97,09	8,48	69,50	5,93	50,39
Indonesia	92,91	7,92	69,43	6,10	49,66

Sumber : SUSENAS Sumatera Barat 2010 dan Sumatera Barat dalam Angka 2010

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadikan diri sebagai manusia yang berguna. Banyak orang miskin yang tidak mendapatkan pendidikan dan menderita

kebodohan sehingga mengakibatkan dirinya terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Pada Tabel 2 dapat diketahui rata-rata angka melek huruf Sumatera Barat pada tahun 2010 yaitu sebesar 97,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 2,91% penduduk Sumatera Barat yang menderita buta huruf atau mengalami kebodohan. Kemudian, dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, angka melek huruf tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi yaitu 99,92%. Artinya hanya 0,08% penduduk Kota Bukittinggi yang mengalami kebodohan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi cukup baik sehingga menyebabkan rendahnya angka kemiskinan di kota tersebut. Sementara itu, angka melek huruf terendah terdapat di Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 93,58%. Artinya 6,42% penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menderita buta huruf dan kebodohan. Hal ini mungkin disebabkan faktor ekonomi yang rendah dan jauhnya Kepulauan Mentawai dari pusat kota sehingga sulit untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Fenomena ini diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten tersebut.

Pada Tabel 2 terdapat suatu hal yang menarik di Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh adalah termasuk daerah yang memiliki penduduk dengan angka melek huruf tertinggi keempat setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang, yaitu sebesar 99,18%. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh tergolong tinggi. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kota

Payakumbuh termasuk tinggi juga karena berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 10,58%. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi angka melek huruf berarti kualitas pendidikan juga semakin meningkat sehingga tingkat kemiskinan juga akan rendah.

Tabel 2 juga menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2010 sebesar 8,48 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat tamatan sekolah dasar atau mengalami putus sekolah di kelas 2 SMP. Ini berarti bahwa program wajib belajar sembilan tahun belum terlaksana dengan baik di Sumatera Barat. Jika diamati antardaerah kabupaten/kota, kualitas pendidikan juga masih tergolong rendah karena 12 dari 19 kabupaten/kota memiliki rata-rata lama sekolah di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Sijunjung. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat belum berhasil meningkatkan pendidikan penduduknya.

Kota Padang memiliki penduduk dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi yaitu sebesar 10,91 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang tamatan SMP atau mengalami putus sekolah di kelas 1 SMA. Ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar sembilan tahun telah terlaksana dengan baik di Kota Padang sehingga kualitas pendidikan juga tergolong baik. Hal ini mungkin disebabkan Kota Padang merupakan ibukota

Provinsi Sumatera Barat yang mana hampir semua kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan dilakukan di Kota Padang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 6,51 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya tamatan sekolah dasar atau mengalami putus sekolah di kelas 1 SMP. Ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum baik dan wajib belajar sembilan tahun belum tercapai. Hal ini mungkin disebabkan karena sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai serta pendapatan penduduk yang rendah sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenyataan ini diduga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga tingkat kesehatan. Seberapa tinggipun pendidikan seseorang, jika tingkat kesehatannya rendah maka kualitasnya akan rendah pula. Tingkat kesehatan seseorang dapat diukur dari angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang berarti semakin baik kesehatannya.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat angka harapan hidup di Kabupaten/Kota Sumatera Barat pada tahun 2010, dimana rata-rata angka harapan hidup Sumatera Barat sebesar 69,50 tahun. Kota Sawahlunto memiliki angka harapan hidup tertinggi yaitu sebesar 71,65 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesehatan penduduk di Kota Sawahlunto

cukup baik karena berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kenyataan ini diduga menyebabkan rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto. Sementara itu, angka harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 64,61 tahun. Hal ini diduga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan.

Selain kualitas sumber daya manusia pertumbuhan ekonomi dan rasio gender juga mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu daerah. Tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Tabel 2 mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,93%. Angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,10%. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tergolong rendah. Jika dilihat antarkabupaten/kota ternyata pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota cukup baik karena lebih dari separoh daerah memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 6,51%. Hal ini mungkin disebabkan karena hasil alam Kabupaten Dharmasraya yang sangat besar sehingga memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhannya. Sementara itu, Kota Sawahlunto memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling rendah yaitu sebesar 5,03%. Hal ini mungkin disebabkan karena berkurangnya pertumbuhan sektor pertambangan di Kota Sawahlunto. Di sini terdapat suatu hal yang menarik,

yaitu secara kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cukup tinggi, sedangkan secara kabupaten/kota tingkat kemiskinan Sumatera Barat cukup tinggi pula. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat belum memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

Teori ekonomi mengatakan bahwa tingginya jumlah penduduk perempuan yang digambarkan oleh rasio gender menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah. Hal ini disebabkan karena penduduk perempuan memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Rasio gender Sumatera Barat pada tahun 2010 sebesar 50,39%. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan nasional, dimana rasio gender Indonesia sebesar 49,66%. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat cukup tinggi karena lebih dari separoh penduduk Sumatera Barat merupakan penduduk perempuan. Kota Bukittinggi memiliki rasio gender tertinggi yaitu sebesar 51,63%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki rasio gender paling rendah yaitu sebesar 48,14%.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Sumatera Barat, dimana tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat berada di bawah tingkat kemiskinan nasional, namun jika diamati antardaerah kabupaten/kota hampir sebagian daerah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan rasio gender di Sumatera Barat sangat bervariasi. Hal ini menjadi suatu

pertanyaan yang menggambarkan apakah kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan rasio gender dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan khususnya di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang capaian kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang dilihat dari kualitas pendidikan dan kesehatan penduduknya serta pertumbuhan ekonomi dan rasio gender melalui penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh kualitas pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh kualitas kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?

5. Sejauhmana pengaruh rasio gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh kualitas pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh kualitas kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pengaruh rasio gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pembangunan, khususnya ekonomi Pembangunan.

2. Sebagai masukan dan pedoman bagi pembuatan perencanaan pembangunan khususnya tentang pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya.
4. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S-1) pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.



BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah makro yang menjadi pusat perhatian pemerintah di dunia termasuk negara Indonesia. Kemiskinan memiliki banyak pengertian dan disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa pendapat yang dikemukakan.

Haughton dan Khandker dalam *Poverty + Inequality* (2009:153) mengemukakan bahwa kemiskinan di daerah ditandai dengan kondisi daerah geografis yang terisolasi, sumber daya yang rendah, curah hujan yang rendah, dan kondisi iklim yang tidak stabil.

Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk. Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan tidak sederhana penanganannya. Menurut Mulyono (2006) kemiskinan berarti ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya (BAPPENAS, 2010:8).

Menurut BPS (2011:6-7) kemiskinan secara konseptual juga dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan *absolute* dan *relative*.

1. Kemiskinan *absolute*

Kemiskinan secara *absolute* ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan *relative*

Kemiskinan *relative* merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada penduduk termiskin.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga

sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III) dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus) (BAPPENAS, 2010:9).

Menurut Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 (Kementrian Koordinasi Bidang Kesra, 2002) kemiskinan dalam arti luas di negara-negara berkembang memiliki wujud yang multidimensi yang meliputi sangat rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, keterbatasan dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang jauh memadai, lingkungan yang tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial (Kamaluddin, 2006:63).

Menurut Sen (1999) dalam Siregar dan Wahyuniarti (2007:27) kemiskinan lebih terkait kepada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup, apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Kuncoro, (1997: 112–113) mengemukakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Definisi tersebut menyiratkan tiga pernyataan dasar, yaitu :

1. Bagaimanakah mengukur standar hidup ?
2. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum ?
3. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit ?

World Bank (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang dan kurang pendidikan. Menurut definisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi diluar kendali mereka. Biasanya karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka (Roy Hendra, 2010:24).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendapatan rendah, tidak berpendidikan, kekurangan gizi, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Dengan keadaan yang demikian seseorang tidak mempunyai kebebasan untuk memilih sehingga tingkat kesejahteraan hidup layak tidak bisa dicapai. Penelitian ini mengacu kepada pengertian kemiskinan secara *absolute* yaitu kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah.

1.2 Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan merupakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah atau ahli ekonomi untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Ukuran kemiskinan yang dikemukakan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menentukan tingkat

kemiskinan suatu negara sangat diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat agar kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dapat berjalan dengan efektif.

Sayogyo memperkenalkan ukuran kemiskinan pertama kalinya di Indonesia yaitu dengan menggunakan garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sayogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita per tahun yang sama dengan beras. Dengan kata lain, garis kemiskinan versi Sayogyo adalah nilai rupiah yang setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk perkotaan. Namun, ukuran kemiskinan Sayogyo banyak mendapatkan kritikan karena memiliki kelemahan yaitu tidak mempertimbangkan tingkat biaya riil (Kuncoro, 1997:118).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan (*basic need approach*) yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Ke-52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. Sedangkan, Garis Kemiskinan

Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Jadi, dapat diketahui bahwa penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk menghitung persentase penduduk miskin di suatu provinsi digunakan rumus :

$$\% \text{ PM}_p = \frac{\text{PM}_p}{\text{P}_p} \dots\dots\dots (1.1)$$

Dimana:

% PM_p = Persentase penduduk miskin di provinsi p

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan ukuran kemiskinan dengan pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga menjadi lima tahapan yaitu keluarga pra Sejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III) dan keluarga sejahtera III plus (KS III-Plus). Keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera I (KS I). Suatu keluarga dikatakan Sejahtera I apabila telah memenuhi lima indikator, sedangkan suatu keluarga dikatakan pra sejahtera apabila tidak memenuhi salah satu dari lima indikator, dimana indikator tersebut adalah (BPS, 2011:15-16) :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah
5. Bila anak sakit atau PUS (pasangan usia subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Pendekatan BKKBN di atas dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih bersifat normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti. Selain itu, ke-5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam, yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

Ukuran kemiskinan menurut *World Bank* (2007:30) adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Angka Kemiskinan (*poverty headcount index*, Po): Indeks ini adalah angka jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan. Indeks ini yang kadang-kadang disebut sebagai angka insiden kemiskinan (*poverty incidence*), adalah ukuran kemiskinan yang paling populer. Namun, ukuran ini tidak dapat membedakan diantara sub-kelompok penduduk miskin, dan juga tidak menunjukkan jangkauan tingkat kemiskinan. Ukuran ini tidak berubah meskipun seorang penduduk miskin menjadi lebih miskin atau menjadi

lebih sejahtera, selama orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan.

- b. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*poverty gap index*, P1): Penurunan rata-rata konsumsi agregat terhadap garis kemiskinan untuk seluruh penduduk, dengan nilai nol (0) diberikan kepada mereka yang berada di atas garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan dapat memberikan indikasi tentang berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui bantuan tunai yang ditujukan secara tepat kepada rakyat miskin. Indeks ini dapat menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan (*the depth of poverty*) dengan lebih baik, tetapi tidak menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan (*the severity of poverty*). Namun, angka tersebut tidak akan berubah, meski terjadi peralihan bantuan dari seorang penduduk miskin kepada penduduk lainnya yang lebih miskin.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*, P2): Ukuran ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk yang sangat miskin dengan mengkuadratkan jarak garis kemiskinan. Angka Ini dihitung dengan mengkuadratkan penurunan relatif konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan, dan kemudian nilai tersebut dirata-ratakan dengan seluruh penduduk, sambil memberikan nilai nol (0) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Ketika bantuan dialihkan dari orang miskin ke orang lain yang lebih miskin, hal ini akan menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan.

Todaro (2006:247) mengatakan bahwa salah satu ukuran kemiskinan yang diperkenalkan oleh UNDP adalah hilangnya tiga hal utama yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun), pendidikan dasar (diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf) dan keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase yang penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran kemiskinan berbeda di masing-masing negara sesuai dengan kebijakan pemerintahannya. Dalam penelitian ini pengukuran tingkat kemiskinan berdasarkan indeks angka kemiskinan (*poverty headcount index*, Po) yaitu perbandingan persentase penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

1.3 Teori dan Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Amartya Sen dalam Todaro (2006:23) mengemukakan bahwa tingkat kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti pemahaman konvensional, yang paling penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari barang-barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan barang-barang tersebut.

Sen dalam Todaro (2006:23) juga mengatakan bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan

status miskin-tidaknya seseorang. Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati.

Berdasarkan pendapat Sen di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan seseorang terjadi karena tidak adanya kemampuan seseorang untuk mengambil manfaat dari barang-barang yang dikonsumsi. Hal ini terjadi karena hilangnya hak-hak dasar orang tersebut seperti tidak mendapatkan makanan bergizi, tidak berpendidikan, kurangnya kemampuan berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya dan tidak memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Hilangnya hak-hak dasar tersebut mengakibatkan seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan mencapai kebahagiaan hidup.

Kartasasmita (1996) juga menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari : *pertama*, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas. *Kedua*, rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. *Ketiga*, terbatasnya lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan. *Keempat*, kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau

terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya (Roy Hendra, 2010:25).

Teori pertumbuhan endogen Romer menjelaskan hubungan sumber daya manusia terhadap pendapatan, dimana pendapatan merupakan fungsi dari capital (K), modal manusia (H), tenaga kerja (L) dan teknologi (A), dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = A f (K, H, L)$$

Sumber daya manusia (H) merupakan faktor utama dalam menentukan pendapatan seseorang. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang berkualitas yaitu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan serta keahlian sehingga memiliki etos kerja yang tinggi. Kualitas manusia tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun informal. Tanpa adanya manusia yang berkualitas faktor-faktor produksi lain tidak akan berfungsi. Teknologi yang canggih tidak akan berarti apa-apa apabila manusia tidak punya keahlian dalam menggunakannya. Modal yang besar tidak akan bermanfaat bila manusia tidak punya kemampuan untuk menggunakannya. Begitu juga dengan tenaga kerja. Manusia tidak akan mampu meningkatkan produktivitas bila pengalaman dan pengetahuannya kurang sehingga pendapatan tidak bisa ditingkatkan. Jika pendapatan rendah, kebutuhan seseorang tidak akan terpenuhi sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi miskin.

Jhingan (2007:417) mengatakan bahwa untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan dan motivasi

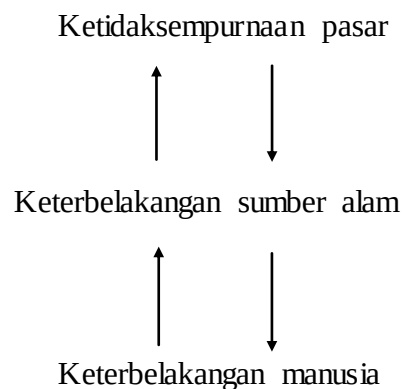
untuk maju, maka adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan rakyat. Pada kenyataannya tanpa perbaikan kualitas faktor manusia tidak mungkin ada kemajuan. Jadi, dapat diketahui bahwa negara itu miskin karena memiliki penduduk yang tidak berkualitas. Meskipun dilakukan pembangunan fisik seperti jalan, pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya, tetapi manusianya tidak berkualitas modal fisik tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik.

Chambers (1987:145-147) mengatakan bahwa bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, di mana “*deprivation trap*” atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu: *Kemiskinan*, mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, kekurangan gizi sehingga menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil. *Kelemahan jasmani*, mendorong seseorang kearah kemiskinan melalui tingkat produktivitas tenaga yang rendah, *Isolasi*, karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil, buta huruf. *Kerentanan*, merupakan kemiskinan karena orang terpaksa menjual kekayaan akibat kejadian yang mendadak. *Ketidakberdayaan*. Mendorong proses kemiskinan dalam berbagai bentuk antara lain, orang yang tidak berdaya seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah. Kelima unsur tersebut kait mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi.

Kemiskinan bersifat multidimensi. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari segi kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang

berupa miskin asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan. Aspek sekunder yang berupa jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 1999:237).

Menurut Nurkse dalam (Jhingan, 2007:33-34) suatu negara dikatakan miskin karena terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan yaitu deretan kekuatan yang satu sama lain beraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Seperti yang terlihat pada Gambar 3 :



Gambar 3. Lingkaran Setan Kemiskinan (Sumber : Jingan, 2007:33-34)

Gambar 3 menunjukkan keterbelakangan manusia dan sumber alam. Pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan akitivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna.

Berdasarkan pendapat Nurkse di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu penyebab miskinnya suatu negara karena penduduknya terbelakang. Keterbelakangan tersebut terjadi karena banyaknya penduduk yang menderita buta huruf, kurangnya pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak bisa memanfaatkan sumber alam dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan. Jadi, dapat dikatakan kemiskinan suatu negara terjadi karena memiliki penduduk yang tidak berpendidikan.

Menurut Elfindri (2001:7), keluarga miskin cenderung memiliki banyak anak, kematian bayi yang tinggi, kurang gizi dan putus sekolah. Sehingga kebijakan makro ekonomi kalau tidak memberikan perhatian yang lebih besar kepada penanggulangan sumber daya manusia, maka akan menghasilkan kelompok-kelompok generasi miskin yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan mutu sumber daya manusia sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu bangsa.

Negara-negara berkembang kemiskinan itu sebagian besar merupakan gejala pedesaan. Bagian terbesar penduduknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Di daerah perkotaan, mayoritas kaum miskin adalah pekerja-pekerja tidak terlatih di sektor jasa-jasa tetapi mereka pun pada umumnya lebih kaya dibandingkan kaum miskin pedesaan. Jadi, tenaga kerja tidak terlatih merupakan milik utama kaum miskin dan menentukan arah kemiskinan adalah adanya permintaan akan produktivitas daripada tenaga kerja mereka (Lewis, 1987:61).

Sharp, et.al (1996:173-191) dalam Kuncoro (1997:120) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu :

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Samuelson dan Nordhaus (1992:460) mengatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah perbedaan dalam pendidikan dan pengalaman. Kurangnya pendidikan merupakan salah satu rintangan terbesar sepanjang sejarah dalam usaha mencapai pemerataan/keseimbangan. Sebelum abad kedua puluh, terdapat jurang yang dalam antara kelas atas yang berpendidikan dengan massa yang buta huruf.

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidakikutsertaan dalam proses

pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu mendayagunakan faktor produksinya dan dapat pula terjadi secara tidak alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi akibat manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka (Arsyad, 1999:237-238).

Haughton dan Khandker dalam *Poverty + Inequality* (2009:153) menjelaskan determinan kemiskinan yaitu :

Karakteristik regional	Keterasingan atau terpencil, termasuk kurangnya infrastruktur dan minimnya akses akan barang dan jasa
Karakteristik umum	Infrastruktur seperti fasilitas air bersih, akses terhadap jalan, distribusi lahan, akses barang-barang publik dan jasa (contoh jarak dari sekolah, klinik), struktur sosial dan modal sosial.
Karakteristik rumah tangga	Ukuran rumah tangga, beban ketergantungan, jenis kelamin kepala rumah tangga, atau rata-rata umur kepala rumah tangga, kepemilikan asset (termasuk tanah, peralatan, dan alat produksi lain, rumah dan perlengkapan), pekerjaan dan pendapatan (orang dewasa yang bekerja; jenis pekerjaan, upah)
Karakteristik individu	Umur, pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan, etnik

Sumber : *Poverty + Inequality* (2009:153)

World Bank (2007:57-61) mengemukakan faktor-faktor penentu kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan. Pendidikan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pendidikan yang tidak memadai. Meningkatkan capaian pendidikan yang

lebih tinggi di wilayah tertentu berkaitan dengan pengurangan kemiskinan yang lebih besar.

- b. Pekerjaan. Bekerja disektor pertanian memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih rendah (dan karena itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin) dibandingkan mereka yang bekerja disektor lain.
- c. Gender. Penilaian terhadap risiko dan kerentanan diantara beberapa tipe rumah tangga dan tahap-tahap siklus hidup yang berbeda mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami guncangan-guncangan negatif akibat konflik, masalah kesehatan dan risiko ekonomi.
- d. Akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar. Rumah tangga di daerah pedesaan yang memiliki lebih banyak akses kepada pendidikan sekolah menengah jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi miskin.
- e. Lokasi geografis. Dengan adanya ketimpangan antarwilayah, tidaklah mengherankan bila lokasi geografis juga berkorelasi dengan kemiskinan, karena lokasi geografis dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah.

Berdasarkan teori-teori kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan oleh banyak faktor. Dari berbagai faktor tersebut sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Faktor tersebut juga sekaligus merupakan salah satu ukuran yang menentukan karakteristik penduduk miskin yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk suatu negara. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diperjelas lebih dalam lagi tentang konsep sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan rasio gender serta pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam pembangunan ekonomi model investasi modal fisik sudah lama dikembangkan oleh ahli ekonomi. Namun, dalam perkembangannya investasi modal fisik tersebut belum memberikan hasil yang maksimal terutama di negara berkembang. Investasi fisik yang berlebihan membuat produksi tidak efisien dan kualitas barang yang dihasilkan rendah. Oleh karena itu, investasi modal manusia memiliki peran lebih penting dalam meningkatkan produktivitas daripada investasi modal fisik.

Jhingan (2007:414) mengatakan pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Manusia yang terdidik dan terlatih akan memiliki

produktivitas yang lebih tinggi daripada tenaga tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja yang terlatih saja tidak akan mampu meningkatkan pendapatan secara maksimal karena memiliki keterbatasan tentang pengetahuan sehingga menyebabkan terjadinya kehidupan yang tidak berkecukupan. Oleh karena itu, peningkatan mutu manusia sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Schultz (1961, 1971) dan Becker (1975) dalam Danim (2004:36) mengembangkan dan menganalisis konsep kesejahteraan manusia, menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk investasi yang mendatangkan keuntungan di masa depan. Manusia terdidik umumnya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan hal itu dapat mendongkrak pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, konsep modal manusia tidak hanya dapat diterapkan pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada aktivitas apa saja yang menambah kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Sumber daya manusia (*human resources*) mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) merupakan usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang

mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Simanjuntak, 1998:1).

Perkembangan ekonomi dan sosial tidak hanya ditentukan oleh sumber daya modal atau materi saja, tetapi juga sumber daya manusia suatu bangsa. Menurut Frederick Harbison dalam Todaro (2000:384) berpendapat bahwa :

Sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan setiap negara. Sumber daya modal dan alam merupakan faktor-faktor produksi yang pasif, sedangkan manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional lebih lanjut. Jelasnya, suatu negara yang tidak mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan serta kecakapan penduduknya maupun memanfaatkannya secara efektif di dalam ekonomi nasional berarti tidak akan mampu mengembangkan apa pun juga.

Menurut Schultz dalam Irianto (2011:60) mengemukakan bahwa modal sumber daya manusia sebagai cerminan nilai dari kapasitas manusia. Modal sumber daya manusia dapat diinvestasikan melalui pendidikan, pelatihan dan meningkatkan kebermanfaatannya sehingga terjadi peningkatan kualitas kerjanya akan berujung pada peningkatan penghasilan. Keterampilan yang diperoleh oleh satu pekerja melalui pendidikan formal maupun nonformal dan pengalaman selama mereka bekerja dapat meningkatkan produktivitas pekerja tersebut dan berakibat pada peningkatan pendapatannya.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan antara lain : sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja dan

sektor pembangunan lainnya. Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup meliputi (Mulyadi, 2003:4-5) :

- a. Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang, dalam arti responsif terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan
- b. Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan mutu pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk miskin dan daerah terpencil
- c. Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan
- d. Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003:91) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan

oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

BPS Indonesia (2011:13) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan PDB.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi para ekonom menggunakan data produk domestik bruto (GDP), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian (Mankiw, 2006:182). Sedangkan menurut Sukirno (2001:10) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara digunakan indikator produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah digunakan indikator produk domestik regional bruto (PDRB). Untuk melihat

fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari PDB atau PDRB atas harga konstan.

4. Rasio Gender

Gender merupakan pembagian spesies ke dalam dua kategori fundamental yang didasarkan pada jenis kelamin atau perbedaan biologis. Gender adalah perbedaan-perbedaan yang secara kultural dipelajari antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, gender semata-mata merujuk pada karakteristik-karakteristik sosial (Djamil, dkk, 2002:3).

Rasio gender merupakan perbandingan jumlah penduduk perempuan terhadap total penduduk. Kesetaraan gender merupakan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender biasanya terjadi di negara-negara termiskin. Kesenjangan gender merupakan perbedaan perlakuan terhadap kaum wanita, dimana kaum wanita memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam segala hal baik dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Kaum wanita memiliki angka buta huruf yang rendah dibandingkan laki-laki. Kaum wanita tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Menurut Moore (1996:149) wanita jarang dipertunjukkan dalam posisi angkatan kerja upahan, mereka sebagian besar dibatasi pada rumah.

5. Pengaruh Variabel *Independent* terhadap Variabel *Dependent*

5.1 Pengaruh Kualitas Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap

tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Menurut Mark blaug (dalam Elfindri, 2001:41) bahwa tidak seharusnya kita memandang pengeluaran pendidikan sebagai kegiatan konsumsi, tetapi hampir mirip dengan penanaman modal atau sebagai investasi.

Studi yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2011) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang *diproxy* dengan indikator lulusan sekolah SMP dan SMA memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Dampak terbesar diperlihatkan oleh pendidikan sekolah pertama (SMP). Dampak ini ternyata lebih besar daripada dampak *share* sektor industri dalam menurunkan kemiskinan. Pendidikan SMA dan DIPLM juga memiliki pengaruh besar dalam mengurangi kemiskinan. Keseluruhan ini mencerminkan bahwa *human capital* merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pengaruh pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara pendidikan seseorang dengan penghasilan yang akan diperolehnya. Tingkat pendapatan tergantung pada tahun-tahun lamanya sekolah yang dapat diselesaikan. Hal itu akan mendorong terjadinya perbedaan pendapatan yang sangat tidak adil dan menimbulkan jurang kemiskinan.

Ahli ekonomi pendidikan Hanushek (2006) dalam Irianto (2011:92) telah menginvestigasi hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan pendapatan individu dan pendapatan nasional. Hubungan

yang signifikan antara pendidikan dan pendapatan ini bukan karena tingkat pendidikannya, tetapi kualitas pendidikan yang tercermin pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen yang paling berperan dalam pembentukan potensi tenaga kerja. Dengan demikian kualitas tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatan seseorang. Karena tenaga kerja yang berkualitas akan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga pendapatannya juga tinggi. Jika pendapatan tinggi berarti kemiskinan akan berkurang.

Jhon Simmons dalam Todaro, (1995:414-415) mengemukakan gambaran bagaimana si miskin memandang pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan sekolah, di mana anak-anak miskin dikebanyakan negara sedang berkembang belajar, tidak selalu merupakan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Mereka adalah yang pertama-tama mengalami putus sekolah karena terpaksa bekerja membantu orang tua, yang pertama-tama ditendang keluar karena seringkali tertidur pulas di kelas sebagai akibat mutu makanannya yang kurang bergizi.

Angka melek huruf atau tingkat kemampuan baca tulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas sumber manusia di suatu daerah. Semakin tinggi angka melek huruf seseorang berarti semakin tinggi keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi persentase pendidikan yang ditamatkan seseorang maka semakin besar aksesnya pada lapangan pekerjaan sehingga kesejahteraannya dapat ditingkatkan. Karena pendidikan dapat mengubah tata nilai, pemikiran dan pola hidup yang secara langsung atau tidak langsung membantu memecahkan permasalahan kemiskinan.

Menurut Becker dalam Irianto (2011:26) keberhasilan pendidikan diukur dari penghasilan lulusan dibandingkan dengan investasi dalam dunia

pendidikan. Persoalan yang muncul adalah peningkatan pendapatan tidak semata-mata berbasis pada proses pendidikan formal, tetapi juga adanya pelatihan, pengalaman pribadi, perbedaan status sosial dan lain-lain yang berperan dalam peningkatan pendapatan.

Pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas seseorang adalah pendidikan yang bisa memberikan seseorang tidak hanya sekedar pengetahuan tetapi juga keterampilan, keahlian, moral, motivasi, etika dan lain sebagainya. Orang yang pendidikannya tinggi tetapi tidak mempunyai keterampilan tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja atau menjadi tenaga kerja yang produktif. Akibatnya akan terjadi pengangguran atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan rendah. Bila seseorang menganggur atau penghasilan rendah maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut menjadi miskin.

Brata (2005) dan Yani Mulyaningsih (2008) menyebutkan bahwa pembangunan manusia yang diproksi dari IPM (*Human Development Index*) memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan, yaitu dimensi yang terkait dengan (a) aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*). (b) upaya untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan (c) akses sumber daya yang mampu memenuhi standar hidup. Ketiga dimensi ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tingkat kemiskinan (Widodo, Waridin dan Maria K, 2011:32).

Penelitian yang dilakukan oleh Prastyo (2010) dan Wijayanto (2010) menemukan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi

terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin maka tingkat pendidikan harus ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin luas pengetahuan dan keterampilan, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan.

Studi yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009) menemukan bahwa pendidikan yang dilihat dari indikator angka melek huruf memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ini berarti bahwa semakin tinggi kemampuan baca tulis seseorang maka akan semakin berkurang tingkat kemiskinan.

5.2 Pengaruh Kualitas Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Orang yang sehat akan mampu melakukan segala kegiatan sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka harapan hidup dan angka kesakitan. Angka harapan hidup yaitu, rata-rata lama hidup seseorang yang diukur dalam tahun, sedangkan angka kesakitan/keluhan kesehatan yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama mendasari kebijakan ini. *Pertama*, berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan kebutuhan konsumsi pokok juga merupakan

tujuan kebijaksanaan sosial yang sangat penting. *Kedua*, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. *Ketiga*, penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tak langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan yakni menurunkan tingkat kesuburan (Arsyad, 1999:243).

Studi Elfindri dan Dasvarma, 1996 memperlihatkan bahwa penurunan angka kurang gizi sangat erat kaitannya terhadap berkurangnya proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan. Diperkirakan penurunan 10 persen dari rumah tangga miskin telah mengurangi 4-6 persen anak-anak prasekolah di bawah gizi normal. Tantangan yang besar dihadapi oleh kelompok negara-negara miskin di atas memperlihatkan bahwa peningkatan mutu manusia dini setidaknya-tidaknya perlu dilakukan melalui usaha-usaha mengurangi jumlah penduduk miskin. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas bekerja saat dewasa (Immink dan Viteri, 1981), dan kesehatan yang baik akan mendukung inteligensi dan daya serap sewaktu mengikuti sekolah formal (Jamison, 1986) (Elfindri, 2001:140 dan 272).

Menurut Sukirno (dalam Apridita, 2011:39), tolak ukur kesehatan yang berhubungan dengan status kesehatan baik perorangan maupun masyarakat disuatu daerah dapat dilihat dari :

- a. Angka Kelahiran dan angka kematian
- b. Angka kesakitan
- c. Angka harapan hidup
- d. Angka yang menyangkut proses persalinan

John Strauss dan Duncan Thomas dalam Todaro (2006:479) menemukan bahwa pria yang lebih tinggi dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak di Brazil. Itu artinya jika tinggi badan merupakan indikator kesehatan maka peningkatan kesehatan dapat menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Saleh (2002) menemukan bahwa tingkat kesehatan yang dilihat dari indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup seseorang berarti menunjukkan tingkat kesehatannya tinggi. Apabila kesehatan seseorang tinggi maka orang tersebut akan terhindar dari kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan sangat menentukan kemiskinan seseorang. Semakin tinggi kesehatan seseorang semakin tinggi produktivitasnya. Semakin tinggi produktivitas maka pendapatan juga akan meningkat. Meningkatnya pendapatan maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Karena jika pendapatan seseorang tinggi maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Artinya seseorang tidak akan hidup di bawah garis kemiskinan.

5.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut hipotesis Kuznets dalam Tambunan (2001:89), pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi yang sangat kuat. Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat

mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Simmon Kuznets dalam Todaro (2003:240) juga mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih atau kurang berpihak pada penduduk miskin. Pertumbuhan dapat menciptakan ketimpangan yang tajam dan dapat mengoyak keutuhan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga dapat menghasilkan pemerataan dan membantu terintegrasinya masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan (*World Bank*, 2007:89).

Laju pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GNP) berkorelasi dengan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen penduduk yang paling miskin. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Bank dunia menyimpulkan hal yang serupa pada laporannya mengenai kemiskinan pada tahun 1990, ketika badan tersebut menyatakan (Todaro, 2003:245) :

Diskusi mengenai kebijakan yang berkenaan dengan golongan miskin biasanya berfokus kepada *trade-off* antara pertumbuhan dan kemiskinan. Namun telaah terhadap pengalaman berbagai negara menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut bukanlah suatu *trade-off* yang dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan yang cepat akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jurang kemiskinan menyempit seiring dengan naiknya seluruh pendapatan per kapita suatu negara. Tentu saja, hubungan yang dekat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan yang terjadi diantara golongan miskin tidak begitu saja mengindikasikan hubungan sebab akibat. Sebagian dari kemajuan yang dinikmati golongan miskin dapat saja berasal dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik diantara golongan miskin untuk mempercepat pertumbuhan secara menyeluruh. Namun, apapun sebabnya yang jelas pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan merupakan dua tujuan yang bisa dicapai secara bersamaan.

5.4 Pengaruh Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan

Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum wanita. Jika dibandingkan standar hidup penduduk termiskin di berbagai negara-negara berkembang, akan terungkap fakta bahwa hampir disemua tempat yang paling menderita adalah kaum wanita beserta anak-anak. Merekalah yang paling menderita kemiskinan atau kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial yang lainnya (Todaro, 2003:256).

Kaum wanita memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan yang layak disektor formal dan program-program lapangan kerja yang dilancarkan pemerintah. Dengan demikian, kaum wanita juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Mereka hanya menunggu penghasilan dari suami. Jika banyak rumah tangga yang dikepalai kaum wanita maka akan lebih besar peluang rumah tangga tersebut terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Hal itu terjadi karena keterbatasan yang dimiliki oleh kaum wanita seperti tidak berpendidikan sehingga menyebabkan dirinya tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal dengan upah tinggi. Beban yang berat harus ditanggung para wanita tersebut karena menjadi orang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar menyebabkan rendahnya tingkat pembelanjaan pangan per kapita.

Todaro (2003:259) juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang diberlakukan di negara-negara berkembang ternyata sering kali memperlebar jurang kesenjangan produktivitas antara kaum pria dan wanita dan dengan sendirinya akan memperburuk ketimpangan pendapatan keduanya, sekaligus memperparah status ekonomi kaum wanita dalam rumah tangganya.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi disajikan pada Tabel 3 :

Tabel 3. Temuan Penelitian Sejenis

No	Peneliti, Judul dan Tahun Terbit	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. Jurnal. "Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia". 2007	Variabel terikat : jumlah orang miskin Variabel bebas : a. PDRB b. Populasi c. <i>Agrishare</i> d. <i>Industrishare</i> e. Inflasi f. Lulusan SMP g. Lulusan SMA h. Lulusan DIPLM i. Dummy krisis	Panel data 26 provinsi (sebelum pemekaran-pemekaran dan setelah disintegrasi Timtim)	a. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia b. Populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia c. <i>Agrishare</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia d. <i>Industrishare</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia e. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia f. Lulusan SMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia g. Lulusan SMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia h. Lulusan DIPLM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia i. Dummy krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
2	Samsubar Saleh. Jurnal. "Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia". 2002	Variabel terikat : tingkat kemiskinan Variabel bebas : a. Pendapatan per kapita b. Pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia c. Pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik d. Angka harapan hidup e. Angka melek huruf	Regresi data panel	a. Pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia b. Kesenjangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia c. Angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia d. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia e. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia

		f. Rata-rata lama sekolah g. Indeks pembangunan manusia h. Indeks partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik i. Rasio gini j. Rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses fasilitas kesehatan k. Rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap air bersih l. Dummy variabel sebelum dan sesudah krisis		f. Investasi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia g. Investasi fisik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia h. Partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia i. Populasi penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia j. Populasi penduduk yang tidak mendapat akses terhadap air bersih berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia k. Dummy krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia
3	Wongdesmiwati. Jurnal. "Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 2009	Variabel terikat : jumlah penduduk miskin Variabel bebas : a. Jumlah penduduk b. PDB c. Angka harapan hidup d. Angka melek huruf e. Penggunaan listrik f. Konsumsi makanan	Regresi panel data	a. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia b. PDB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia c. Angka melek huruf berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
4	Nur Tsaniah Firdausi. Skripsi. "Proyeksi tingkat kemiskinan di Indonesia". 2010	Variabel terikat : tingkat kemiskinan Variabel bebas : a. PDRB per kapita b. Angka harapan hidup	Regresi dengan model <i>Least Square Dummy Variabel</i> (LSDV)	a. PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia b. Angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
5	Widiyatma Nugroho. Skripsi. "Analisis pengaruh	Variable terikat : jumlah penduduk miskin	Regresi linear panel data	a. PDRB berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia

	PDRB, <i>agrishare</i> , rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. 2012	Variable bebas : a. PDRB b. <i>Agrishare</i> c. Angka melek huruf d. Rata-rata lama sekolah	dengan metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	b. <i>Agrishare</i> berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia c. Rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia d. Angka melek huruf tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
6	Merna Kumalasari. Skripsi. "Analisis pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah". 2010	Variable terikat : tingkat kemiskinan Variable bebas : a. Laju pertumbuhan ekonomi b. Angka harapan hidup c. Angka melek huruf d. Rata-rata lama sekolah e. Pengeluaran perkapita f. Jumlah penduduk	Panel data dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	a. Angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah b. Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah c. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah
7	Ravi Dwi Wijayanto. Skripsi. "Analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008". 2010	Variable terikat : tingkat kemiskinan Variable bebas : a. Laju PDRB harga konstan 2000 b. Angka melek huruf c. Pengangguran	Regresi linear panel data dengan metode FEM	a. PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah b. Angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah c. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah
8	Adit Agus Prastyo. Skripsi. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah". 2010	Variable terikat : tingkat kemiskinan Variable bebas : a. Pertumbuhan ekonomi b. Upah minimum c. Pendidikan d. Tingkat pengangguran	Panel data dengan pendekatan efek tetap (FEM)	a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah b. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah c. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah d. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 3, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penulis dalam pemilihan variabel dan indikatornya. Dari kedelapan temuan penelitian sejenis di atas banyak peneliti menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Ada juga peneliti menggunakan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikatnya. Namun, variabel tersebut kurang relevan karena jumlah penduduk miskin yang diukur dalam satuan jiwa akan memberikan ketidakadilan antardaerah. Jika jumlah penduduk suatu daerah banyak, maka daerah tersebut juga memiliki penduduk miskin paling banyak atau sebaliknya. Sementara, daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak belum tentu memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi juga. Oleh karena itu, penulis menggunakan variabel tingkat kemiskinan.

Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti terdahulu sangat beragam. Untuk mengukur kualitas pendidikan dan kesehatan peneliti terdahulu umumnya menggunakan indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan angka harapan hidup. Namun, pada penelitian ini penulis menggunakan angka melek huruf dan angka harapan hidup sebagai ukuran pendidikan dan kesehatan.

Selain kualitas sumber daya manusia banyak variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Variabel-variabel lain tersebut digunakan juga oleh penulis sebagai variabel bebas. Karena keterbatasan data maka penulis membatasi variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan rasio gender. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini

menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan rasio gender. Data yang digunakan dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

C. Kerangka Konseptual

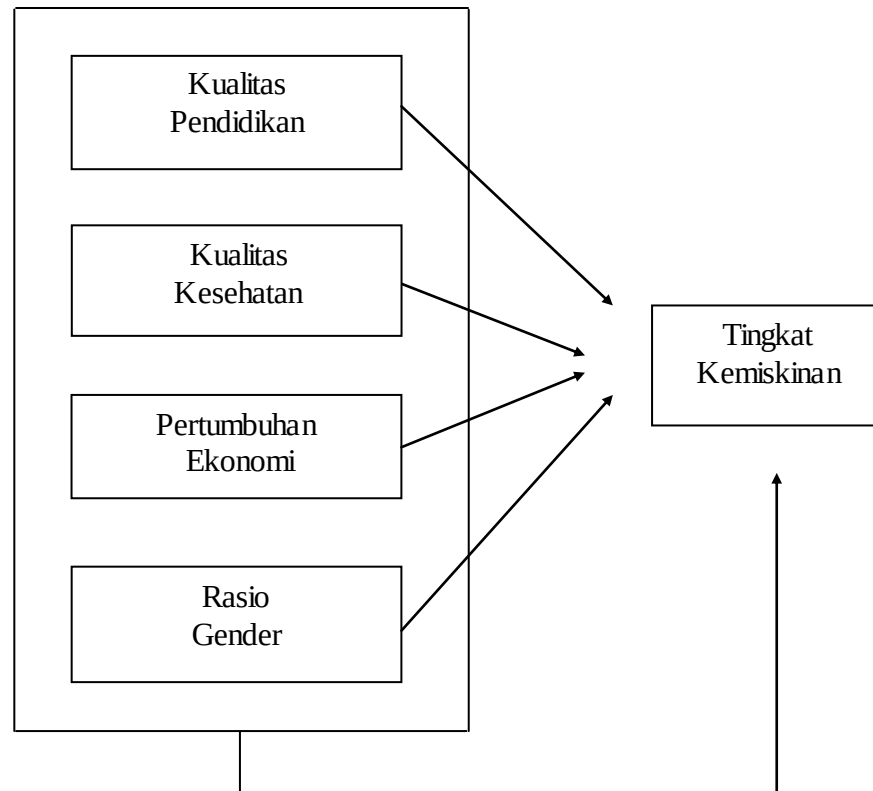
Berdasarkan pada teori kemiskinan menurut Amartya Sen dalam Todaro (2006) dan teori pendukung lainnya serta temuan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebasnya adalah kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan rasio gender. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka melek huruf, sedangkan kualitas kesehatan dapat dilihat dari indikator angka harapan hidup.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan rasio gender. Apabila kualitas pendidikan penduduk di daerah kabupaten/kota Sumatera Barat meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan berkurang dan sebaliknya apabila kualitas pendidikan penduduk di daerah kabupaten/kota Sumatera Barat menurun, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan meningkat. Kemudian, apabila kualitas kesehatan

penduduk di daerah kabupaten/kota Sumatera Barat meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan menurun dan sebaliknya. Apabila kualitas kesehatan penduduk di daerah kabupaten/kota Sumatera Barat menurun, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan meningkat.

Jika pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat meningkat, maka tingkat kemiskinan bisa menurun atau bisa juga meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat menurun, maka tingkat kemiskinan bisa meningkat atau bisa juga menurun. Sedangkan peningkatan rasio gender di daerah kabupaten/kota Sumatera Barat akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Sebaliknya, penurunan rasio gender di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun.

Secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4 :



Gambar 4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gender terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel. Maka hipotesis penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

1. Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

2. Kualitas pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

3. Kualitas kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

5. Rasio gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan teori, faktor penyebab kemiskinan antara lain: kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang digambarkan dengan tingginya kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk akan menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena semakin banyak penduduk suatu daerah yang berpendidikan berarti semakin banyak penduduk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Penduduk yang berilmu pengetahuan akan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Penduduk yang memiliki pendidikan juga akan mempunyai kebebasan untuk memilih pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan kualitas kesehatan. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan. Kesehatan seseorang akan mempengaruhi produktivitas orang tersebut. Orang yang sehat akan memiliki produktivitas yang tinggi. Kesehatan dan pendidikan merupakan investasi gabungan dalam pembangunan daerah. Orang yang berpendidikan tinggi tidak akan mampu mendapatkan penghasilan yang tinggi pula jika kesehatannya terganggu. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dan kesehatan sangat menentukan miskin tidaknya seseorang.

Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat belum berkualitas. Artinya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat belum merata dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk berpenghasilan tinggi dibandingkan kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Rasio gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Artinya tinggi atau rendahnya rasio gender tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena budaya Minangkabau (Sumatera Barat) yang menganut sistem matrilinear, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat merupakan satu paket yang saling ketergantungan dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak terjadi deskriminasi terhadap kaum perempuan. Selain itu, partisipasi kaum perempuan terhadap pendidikan dan bekerja juga sangat tinggi.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Dengan demikian, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan juga harus tepat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan sebaiknya lebih

memprioritaskan pendidikan dan kesehatan penduduk, karena pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam memajukan suatu daerah. Semakin tinggi kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk suatu daerah semakin tinggi pula produktivitas penduduk dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pemerintah Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pemberian berbagai macam beasiswa agar seluruh penduduk bisa mendapatkan pendidikan. Namun, pemerintah Sumatera Barat harus lebih memperhatikan penduduk yang tinggal jauh dari pusat kota atau terpencil, seperti daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Kemudian, pemerintah juga harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran. Diantaranya, menambah jumlah sekolah dengan jumlah kelas yang banyak sehingga anak – anak dapat bersekolah tanpa terkendala oleh jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, serta menyediakan tenaga pendidik yang professional.

Kualitas pendidikan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan, karena pendidikan dan kesehatan merupakan investasi gabungan yang sama pentingnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Seberapa tinggi pun pendidikan seseorang, tetapi kesehatannya buruk maka kemiskinan juga tidak akan berkurang. Untuk itu, kualitas kesehatan sangat penting untuk memerangi masalah kemiskinan. Pemerintah

Sumatera Barat juga telah melakukan berbagai program kesehatan seperti ASKESKIN (asuransi kesehatan masyarakat miskin), JAMKESDA (jaminan kesehatan daerah), JAMKESMAS (jaminan kesehatan masyarakat), dan JAMPERSAL (jaminan persalinan). Program tersebut sudah terlaksana dengan cukup baik, namun dalam proses pengurusan surat-suratnya masih membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah Sumatera Barat agar mempermudah pengurusan surat-surat dan program tersebut harus merata dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin. Kemudian, pemerintah juga harus menambah sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas serta tenaga medis yang handal di daerah-daerah yang terisolir supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat belum berkualitas karena belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Barat harus berusaha meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan cara memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui pemberian bibit unggul dengan harga yang terjangkau kepada para petani, pemberian pupuk bersubsidi dan meningkatkan distribusi pendapatan bagi kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Kaum perempuan mempengaruhi angka kemiskinan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian, tinggi atau rendahnya jumlah penduduk perempuan tidak mempengaruhi angka kemiskinan di Sumatera Barat. Meskipun demikian, pemerintah Sumatera Barat harus lebih memperhatikan kaum perempuan melalui pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan agar kaum perempuan memiliki kebebasan untuk memilih.

Penulis juga menyarankan bahwa model yang penulis pakai dalam penelitian ini bukanlah satu-satunya model yang absolut dalam menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk terus mengembangkan penelitian ini sehingga dapat menambah literatur tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gender terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada khususnya dan dunia pada umumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Apridita, Feni. 2011. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat*. Padang: FE UNP
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: FE UGM
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat tahun 2008*. Padang: BPS
- _____. 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat tahun 2009*. Padang: BPS
- _____. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat tahun 2010*. Padang: BPS
- _____. 2006. *Sumatera Barat dalam Angka 2006*. Padang: BPS
- _____. 2007. *Sumatera Barat dalam Angka 2007*. Padang: BPS
- _____. 2008. *Sumatera Barat dalam Angka 2008*. Padang: BPS
- _____. 2009. *Sumatera Barat dalam Angka 2009*. Padang: BPS
- _____. 2010. *Sumatera Barat dalam Angka 2010*. Padang: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat (Tinjauan PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha) Tahun 2006-2010*. Padang: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. 2010. *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)*. Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 2012. *Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Partai Demokrat
- Danim, Prof. Dr. Sudarwan. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: UNAND
- Firdausi, Nur Tsaniah. 2010. *Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Terjemah Mulyadi. Jakarta: Erlangga
- Hendra, Roy. 2010. *Determinan Kemiskinan*. Skripsi diterbitkan. Jakarta : FE UI
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R Kahandker. 2012. *Handbook On Poperty + Inequality*. Jakarta: World Bank.
- Irianto, Prof. H. Agus. 2011. *Pendidikan sebagai Investai dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana
- Jhingan, M. L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kamaluddin, Rustian. 2006. *Beberapa Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah dan Hubungan Ekonomi Keuangan Luar Negeri*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Kumalasari, Rustian. 2011. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Per Kapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Skripsi diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Lewis, John P dan Kallab, Valerianan. 1987. *Mengakji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*. Jakarta: UI-PRESS
- Nugroho, Widiyatma. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Skripsi diterbitkan. Semarang: UNDIP

- Prastyo, Adit Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Skripsi diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Saleh, Samsubar. 2007. *Faktor-faktor penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Diakses 12 Mei 2012
- Samuelson, Paul A dan William D Nordhaus. 1992. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Setiawan & Dwi Endah Kusri. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FE UI
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. *Jurnal Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Bogor: ITB
- S, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta: FE UGM
- Tambunan, Dr. Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Jakarta: TNP2K
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Widodo, Adi dan Johanna Maria K. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa*

Tengah : Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1. Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP

Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi diterbitkan. Semarang: UNDIP

Winarno, Wing. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP SIIM YKPN

Wongdesmiwati. 2009. *Jurnal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. ([http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri .pdf](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri.pdf). Diakses 15 Mei 2012)

World, Bank. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: World Bank